

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju kearah yang lebih baik secara terus menerus untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, kemakmuran, dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga semakin mendekati tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh yang adil dan merata. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada daerah yang membutuhkan perhatian khusus. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah menurunnya jumlah penduduk miskin (Rosnawati, 2015).

Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu Dana Desa yang adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 2016 Tentang Dana Desa).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Kabupaten Lembata merupakan salah satu Kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang terus berkembang, Kabupaten Lembata ditetapkan sebagai kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Flores Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Lembata. Kehidupan masyarakat Lembata secara bertahap terus bergerak semakin maju dan berkembang sehingga menjadi salah satu pusat layanan dan pusat pertumbuhan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemajuan tersebut telah membangkitkan

harapan dan optimism bagi masyarakat dan pemerintah Daerah Kabupaten Lembata bahwa dinamika pembangunan telah memberikan arah yang lebih jelas menuju tata kehidupan yang lebih maju dan sejahtera.

Desa Hadakewa, desa yang berpenduduk 1.052 dari 254 kepala keluarga itu, dengan mengenal karakteristik warga serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, pemanfaatan Dana Desa di Desa Hadakewa telah membangun mata rantai infrastruktur investasi yang saling menguntungkan seperti : Taman baca yang terletak di pesisir pantai, lapangan futsal, pelabuhan kaci untuk nelayan dan aula serba guna.

Penduduk Desa Hadakewa berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, sehingga tradisi-tradisi untuk melaksanakan sesuatu dominan harus musyawarah untuk mufakat, gotongroyong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Hadakewa dan hal tersebut efektif dapat menghindari benturan-benturan kelompok masyarakat.

Desa Hadakewa merupakan desa dengan mayoritas mata pencariannya sebagai nelayan, walaupun sebagian kecil masyarakatnya petani dan buruh tani. Secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti Nelayan, Buruh bangunan, Buruh tani, Petani, dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, Honorer, Guru, Tenaga medis.

Dengan Adanya Dana desa diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, baik terhadap pembangunan maupun kesejahteraan. Dana desa dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta

mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Hadakewa
Tahun Anggaran 2017-2018

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2017		
1	Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa	646.262.817,00	646.262.817,00
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	131.676.509,00	131.676.509,00
	Jumlah	777.939.326,00	777.939.326,00
	2018		
1	Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa	596.221.094,82	596.221.094,82
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	119.698.000,00	119.698.000,00
	Jumlah	715.919.094,82	715.919.094,82

Sumber data : Kantor Desa Hadakewa

Dari data 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa dari tahun 2017-2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Pemerintah Desa Hadakewa dari bidang pelaksanaan pembangunan Desa belum terlihat jelas pembangunan di Desa Hadakewa salah satunya Pembangunan jalan pemukiman, Kegiatan pengadaan Website Desa serta Taman Baca. Dengan begitu besar dana dilihat dari pendapatan transfer yaitu Rp 777.947.296,00 pada tahun 2017, dan Rp 772.665.337,00

Dengan melihat data diatas terkait dampak yang dirasakan, ada begitu banyak program-program yang dibuat baik dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa maupun bidang pemberdayaan masyarakat. Apakah dengan

program-program yang sudah dibuat mampu mensejahterahkan masyarakat desa?. Alasan ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Hadakewa**” .

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah“Bagaimana Dampak Program Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Hadakewa”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja dampak dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah penelitian.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penelitian

Untuk menyelesaikan tugas akhir dan isyarat kelulusan S1 Akuntansi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

b. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan untuk mengetahui dampak dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan sebagai pedoman atau untuk peneliti selanjutnya

tentang dampak dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa hadakewa.